

PERGESERAN IDEOLOGI DAN GERAKAN ISLAM: DARI SALAFI, FUNDAMENTALISME KE ISLAMISME

Rasuki¹, Nur Rahmad Yahya Wijaya²

^{1,2}Institut Kariman Wirayudha Sumenep

¹rasukimh1@gmail.com

Abstract

This paper discusses the shifting ideology and Islamic movements that have occurred in several countries with Muslim-majority populations. By explaining some of the thoughts of Salafi and Fundamentalist ideologues such as Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Ibn Abdul Wahab, apart from maintaining the purity of Islamic teachings, these two ideologies became the embryos for the birth of the ideology and movement of contemporary Islamism. Ideologists of Islamism such as Al-Maududi, Al-Banna responded to the dynamics of problems in Muslim society in general by voicing alternatives by proposing Islam as the final option by establishing an Islamic state and implementing Islamic law in the institution of an Islamic caliphate.

Keywords: Fundamentalism, Islamism, Islamic State, Islamic Syaria

Abstrak

Tulisan ini membahas soal bergesernya ideologi dan gerakan Islam yang terjadi di beberapa negara berpenduduk muslim mayoritas. Dengan menjelaskan beberapa pemikiran para ideolog Salafi dan Fundamentalisme seperti Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-jauziyah, Muhammad Ibn Abdul Wahab, selain mempertahankan kemurnian ajaran Islam, kedua ideologi ini menjadi embrio lahirnya ideologi dan gerakan Islamisme kontemporer. Ideolog Islamisme seperti Al-Maududi, Al-Banna merespon dinamika problem masyarakat muslim pada umumnya dengan menyuarakan alternatif dengan mengajukan Islam sebagai pilihan akhir dengan mendirikan negara Islam serta penerapan syariat Islam dalam institusi khilafah Islamiyah.

Keywords: Fundamentalisme, Islamisme, Negara Islam, Syariat Islam

Pendahuluan

Fenomena yang menjadi perhatian cukup serius banyak kalangan beragama di Indonesia pasca berakhirnya rezim Orde Baru adalah menguatnya tuntutan penerapan syariat Islam dan penegakan Negara Islam (Islamic state). Tuntutan penegakan syariat Islam dan atau berdirinya Negara Islam digemakan oleh kelompok fundamentalis atau Islamis. Dengan dalih penerapan syariat Islam dan atau berdirinya negara Islam, tuntutan mereka tidak saja dilakukan dengan cara-cara damai, bahkan tidak jarang-dengan mobilisasi massa-tindakan mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan.

Apa yang menjadi tuntutan kelompok fundamentalisme dan Islamisme dengan ketidak puasan mereka terhadap eksistensi negara sekuler dalam mengelola negara, menimbulkan penilaian negatif dan penolakannya terhadap bentuk negara sekuler atau negara demokrasi. Martin menyebut dua pemicu utama munculnya kelompok tersebut. Pertama, menguatnya isu kegagalan politik lokal rezim berkuasa (political failures in the regim) pada waktu itu dan terjadinya marginalisasi politik (political marginalization); kedua, menguatnya jaringan solidaritas antarmuslim di seluruh dunia,¹ sehingga gerakan Islamisme yang terjadi di beberapa belahan dunia berpenduduk muslim mayoritas juga merembes ke Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam.

Ideologi kelompok Fundamentalisme dan Islamisme mewujud pada ormas Islam Indonesia seperti FPI, KAMMI, MMI dan HTI, ormas yang berdiri sejak tumbangannya rezim Orde Baru. Sedangkan di India berdiri Jama'ah al-Islami, dan Ikhwan al-Muslimin (IM) di Mesir, di mana baik Jama'ah al-Islami dan Ikhwan al-Muslimin keduanya mengusung ideologi tegaknya negara Islam dengan maksud menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara.

Gerakan Islamisme kontemporer berbeda dengan ideologi pendahulunya; Salafi dan Wahabi. Ideologi Salafi dan Wahabi-setidaknya

¹ Jamhari, "Mapping Radical Islam in Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, 3 (2003), 9

pada tahap awal-dakwah keislamannya mengajarkan pemurnikan ajaran Islam (purifikasi) melalui pemahaman dan praktek keagamaan dengan mengikuti apa yang sudah termaktub pada kitab suci, al-Quran dan Hadits. Kedua ideologi ini menginginkan kehidupan muslim hari ini, mengikuti Nabi dan para pendahulu Islam (al-Salaf al-Shaleh) sebagai praktek ideal dalam melaksanakan syariah Islam, selain dengan cara memberantas segala bentuk amaliah yang tergolong sebagai khurafat, bid'ah atau penyimpangan.

Ideologi dan gerakan fundamentalisme-yang sering disebut dengan faham Wahabi-Salafi-selanjutnya tersebar keberbagai Negara berpenduduk Muslim mayoritas, dengan semangat dan ideologi yang sama sebagaimana ideology Salafi, orientasi dan gerakan ideologinya sudah berubah. Kelompok ini mulai menyentuh dimensi politik-kekuasaan untuk mendirikan negara Islam dan penerapan syariat Islam. Inilah ideologi Islamisme (sebagian menyebut Islam politik).

Tuntutan penerapan syariat Islam tetap mengemuka sejauh negara masih menganut sistem demokrasi. Tuntutan penerapan syariat Islam maupun berdirinya negara Islam sampai era reformasi, wacana tersebut terus hidup dan mewarnai corak dinamika politik maupun realitas sosiologis masyarakat dan kehidupan bernegara. Meski harus diakui bahwa para pengusung ideologi Fundamentalisme atau Islamisme, suara mereka hanya mewakili sebagian kecil aspirasi kaum muslim. Tapi, faktanya gagasan menghidupkan kembali penerapan syariat Islam atau berdirinya bentuk negara Islam khususnya, tidak pernah mati.²

Dengan mengungkap gagasan dasar ideologi Salafi dan Fundamnetalisme, tulisan ini hendak mengungkap ketersambungan sekaligus pergeseran ideologi keduanya yang pada akhirnya mewujud dalam ideologi dan gerakan Islamisme di abad komtemporer.

² Patmono, "Aspirasi Islam Dalam Konteks Negara Bangsa" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.). *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. (Bandung: Mizan, 2006).

Makna dan Sejarah Salafi, Fundamentalisme dan Islamisme

Dalam terminologi bahasa arab, istilah populer yang sering diperbincangan adalah kata salaf, salafi dan salafiyah. Istilah salaf adalah bentuk masdar dari fi'il madhi salafa yang artinya "sudah berlalu, mendahului, atau lebih dahulu".³ Sebagaimana pernyataan alqoumu al-salaf al-mutaqaddimun artinya kaum salaf, adalah orang-orang yang terdahulu. Sebagai istilah dari bahasa arab, kata salaf juga merupakan bentuk tunggal (mufrod) sedangkan bentuk jamaknya adalah aslaf atau sallaf. Maka kata salaf yang dimaksud adalah para pendahulu atau orang-orang yang sebelumnya adalah mereka yang berilmu atau para ulama shaleh terdahulu, al-salaf al-shalih. Lawan istilah salaf adalah khalaf (modern) yang artinya adalah sekarang atau kekinian.

Dalam pengertian yang lebih luas, makna salaf adalah kembali kepada Islam sejati (murni), Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh pendiri dan generasi Islam awal, yakni Nabi Muhammad, para shahabat dan Tabi'in. Mereka memahami dan mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang telah dicontohkan langsung oleh Nabi. Para idealis dan penganjur paham Salaf, menangkap dan mengamalkan esensi Islam dalam bentuk formal sebagaimana pada masa awalnya. Mereka inilah yang seringkali dilabeli dengan sebutan salafisme.

Mayoritas ulama sepakat bahwa rentang waktu atau periode salaf selama tiga abad pasca-meninggalnya Nabi Muhammad. Dalam kurun waktu itu pula salaf terbagi pada tiga generasi awal Islam yaitu masa para shahabat Nabi sampai pada shahabat Anas ibn Malik (w. 9 H./710 M.), tabi'in (180 H./796 M.) dan berakhir pada Imam Ahmad ibn Hambal (169-241 H), dan sekaligus menjadi akhir dari generasi salaf.⁴ Mereka adalah generasi Islam awal (salaf) yang tidak hanya memahami, tapi

³ Ahmad Warison Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), 651

⁴ Emad Eldin Shahin, "Salafiyah", Dalam John L. Esposito (ed) *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 5, (Oxford: Oxford University Press, 1995), 104

mengikuti/mengamalkan agama sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi.

Jika istilah Salaf pertama kali lahir di dunia Islam, sebaliknya berbeda dengan fundamentalisme. Istilah fundamentalisme pertama kali lahir di dunia Barat. Secara etimologi fundamentalisme berasal dari kata fundamen yang artinya hal-hal mendasar atau asas-asas. Secara terminologi fundamentalisme adalah aliran/faham pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara kaku (rigid) dan tekstual (literar).⁵ Hal ini sama dengan pandangan Gellner bahwa dasar utama gagasan fundamentalisme adalah keyakinan agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuknya yang literal (harfiyah) dan bulat, tanpa kompromi, dan tanpa interpretasi.⁶ Dengan kata lain, pemahaman terhadap agama sebatas mengikuti apa yang telah tertera secara jelas (qath'i), apa adanya, tanpa ada pengurangan atau penambahan sedikitpun terhadap bunyi kitab suci.

Dalam sejarahnya, istilah fundamentalis keagamaan pertama kali muncul di kalangan Kristen. Dalam artikelnya yang bertitel "The Myth of Islamic Fundamentalism," Ilyas Ba-Yunus sebagai seorang sosiolog muslim, menyebut bahwa diskursus fundamentalisme pertama kali muncul dalam satu konferensi mengenai Bible 1978, yang diselenggarakan di Niagara Falls New York.⁷ Konferensi ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting dari kalangan pimpinan Baptis, Presbyterian dan para aktivis Gereja yang melahirkan kesepakatan 9 prinsip fundamental. Dalam penandatanganan konferensi tersebut mereka menamakan diri sebagai kelompok (kaum) fundamentalisme, sedangkan bagi para penentangannya disebut dengan kaum zindik/bid'ah (heretic).

⁵ Mahmud Amin Al-Alim, "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam Jurnal Tashwirul Afkar, (Edisi No. 1 Tahun 2002), 20

⁶ Ernest Gellner, *Postmodernisme, Reason and Religion*, (London: Routledge, 1992), 15-18

⁷ Syafiq Hasyim, "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam Jurnal Tashwirul Afkar, (Edisi No. 1 Tahun 2002), 8

Meski para pengikut konfrensi itu dengan tegas mendeklarasikan diri sebagai kaum fundamentalisi, tidak sedikit di luar mereka yang dengan tegas menolak label itu. Mereka menganggap bahwa fundamentalisme tidak mewakili akidah yang dianut, klaim sebegini kaum fundamentalisme tidak merepresentasikan orang Kristen secara keseluruhan. Dengan ketidaksetujuan sebutan kaum fundamentalisme, mereka lebih suka menyebut dirinya/golongan dengan sebutan “Kristen sejati” atau Kristen saja.⁸

Kendati pada awalnya fundamentalisme lahir di Amerika Serikat dari kelompok agama Kristen, dan dengan makna dan pengalaman yang sama, fundamentalisme juga dialami oleh agama lain seperti fundamentalisme pada Hindu, Budha maupun fundamentalisme pada Islam, dengan mengingat adanya semangat yang sama dengan ideologi fundamentalismenya. Sejarah lahir fundamentalisme sebagai upaya membendung diri dari ancaman modernisme yang menodai kesucian agama dengan berkeinginan untuk kembali kepada teks-teks kitab suci agama.

Fenomena fundamentalisme pada masa Islam awal (Salaf) misalnya, dapat kita lihat pada kritik Imam Ahmad ibn Hambal terhadap kelompok Mu'tazilah dan semua pengamal metode rasionalis. Dengan semangat yang sama, Imam Ahmad ibn Hambal serta para pendukungnya berupaya memurnikan kembali ajaran Islam dari berbagai macam bentuk praktek yang bersifat tahayul, khurafat dan bid'ah, atau dengan kata lain menolak segala amaliyah yang tidak dicontohkan Nabi dan para shahabat.

Fundamentalisme Islam terus berlangsung pada masa modern. Sekedar menyebut beberapa nama semisal Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad ibn Abdul Wahab adalah pelanjut dan sekaligus penerus dalam mendiseminasi ajaran dasar Islam sesungguhnya dengan spirit pemurnian akidah Islam (puritanisme) dari semua bentuk praktek keagamaan yang berbau bid'ah. Dengan semangat dan ideologinya

⁸ Haidar Ibrahim Ali, *Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme*, di kases tanggal 11 April 2023

kemudian mereka-kelompok fundamentalisme-mempopulerkan jargon “kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadits”.

Sedangkan istilah Islamisme diperkenalkan pertama kali oleh Filsuf Prancis, Voltaire (1694-1778) dengan menggunakan istilah Islamisme sebagai pengganti kata dari istilah Mohammedisme yang kemudian digunakan di kalangan orang Eropa untuk agama orang Arab. Istilah itu kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dalam edisi (1900) Oxford English Dictionary. Tetapi, istilah Islamisme kemudian jarang digunakan untuk waktu yang lama. Karena Islam politik baru-baru ini menjadi isu penting dalam politik internasional pasca-Perang Dingin, istilah Islamisme sekali lagi menjadi istilah yang banyak digunakan di kalangan cendekiawan, dan jurnalis. Kini, secara lebih umum, istilah tersebut mengacu pada jenis khusus penafsiran, organisasi, dan gerakan keagamaan di kalangan umat Islam yang menekankan keunikan dan keunggulan Islam atas ideologi politik lainnya. Istilah Islamisme kadang sering digunakan secara bergantian dengan istilah fundamentalisme dan Salafisme.⁹

Selain pertama kali dikenalkan di dunia Barat, istilah Islamisme juga melahirkan perbedaan pengertian dikalangan para pengkaji gerakan keislaman, baik ilmuwan muslim dan Barat. James Piscatori misalnya, mendefinisikan Islamisme sebagai sebuah gerakan dikalangan Muslim yang berkomitmen terhadap aksi publik untuk mewujudkan agenda Islam. Akan tetapi, pengertian James tersebut direvisi oleh Donal Emmerson dengan mendefinisikan Islamisme dengan komitmen muslim terhadap dan isi agenda tersebut.

Graham Fuller, mendefinisikannya secara lebih jelas bahwa Islamisme sebagai Islam politik yang diusung oleh orang-orang yang meyakini bahwa Islam memiliki tawaran soal bagaimana politik dan masyarakat dikelola dalam dunia Muslim kontemporer serta hendak

⁹ Ahmad N. Permata, *Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006*, (Tesis, Philosophischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster, 2008), 18.

mewujudkannya dalam berbagai cara.¹⁰ Akan tetapi dalam tataran praksisnya, apakah Islamisme merujuk pada semua Islam dan yang tidak selalu berorientasi kepada politik kekuasaan atau sebatas berkenaan dengan gerakan Islam politik semata.

Asef Bayat mendefinisikan Islamisme sebagai ideologi dan gerakan yang berusaha untuk membangun tatanan Islam (ideologies and movements that strive to establish some kind of an Islamic order), yang dapat berbentuk negara Islam, hukum syariah, atau nilai-nilai yang berasal dari moralitas Islam sendiri.¹¹ Definisi yang dibuat Bayat tersebut berkaitan dengan gerakan Islamisme di mana ia lahir sebagai bahasa penegasan diri dalam memobilisasi masyarakat seperti kebanyakan kelas menengah misalnya, yang merasa termarginalkan oleh proses-proses ekonomi, politik atau budaya dominan dalam masyarakat, yang merasakan langsung terhadap kegagalan modernitas-kapitalis maupun utopis sosialis yang kemudian membuat bahasa moralitas melalui agama dan menginginkan pergantian sistem politik.¹²

Dengan beberapa alasan tersebut, Bayat kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa gerakan Islamisme memiliki dua misi utama: pertama, Islamisme mencoba mengartikulasikan sebuah versi Islam yang dapat merespon defisit politik, ekonomi, dan budaya mereka, kedua, Islamisme membayangkan Islam sebagai sebuah sistem ketuhanan yang sempurna dengan model politik, kode budaya, struktur hukum, dan tata ekonomi yang superior.¹³ Islamisme sebagai ideologi dan gerakan Islam pada masa kontemporer di pelopori diantaranya oleh Hasan Al-Banna, dan Sayyid Qutb, keduanya dari Mesir, dan Abu al-A'la al-Maududi dari Pakistan yang dikenal sebagai pendukung utama ideologi Islamisme.

¹⁰ Sheri Berman, "Islamisme, revolution, and Civil Society", *Perspectives on Politics*, 1 (2: 2003), 258

¹¹ Asef Bayat, "The Coming of a Post-Islamist Society", *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, (Vol. 5, No. 9, 1996), 43-52.

¹² Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, Terjemahan oleh. Faiz Tajul Milah, (Yogyakarta: LKiS, 2011), 12

¹³ *Ibid*, 12

Dari Ideologi Salafi, Fundamentalisme ke Gerakan Islamisme

Pada awalnya, ada dua kecenderungan faham berbeda dalam memahami dan mendekati makna kebenaran agama. Kecenderungan pertama dengan menggunakan pendekatan metode rasional, diwakili oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok yang sangat mendewakan kemampuan akal pikiran manusia dalam mengungkap makna dan kebenaran dibalik teks agama. Kecenderungan kedua menolak keras kecenderungan rasionalis/Mu'tazilah diwakili kelompok salaf dengan pendekatan metode tekstual. Kecenderungan metode ini mengharuskan rasio untuk tunduk kepada naqli (teks) dan membatasi wewenang akal dalam persoalan agama termasuk batasan dan kemampuan akal di dalam menakwilkan dan menafsirkan al-Qur'an atau al-Hadits.

Sebagai penganut pendekatan metode tekstual dengan menolak keras pendekatan keislaman rasionalis Mu'tazilah pada awalnya adalah Imam Ahmad bin Hambal (169-241 H), salah satu murid Imam al-Syafi'ie, peletak dasar metode tekstualis. Ia tidak hanya menentang golongan Mu'tazilah, tapi semua gerakan keislaman yang berhaluan rasionalis pada masyarakat muslim saat itu menjadi sasaran kritik keras Imam Hambali dan pengikutnya. Sebagai corak baru pemahaman keislaman ini tidak berhenti sampai di situ, dalam perjalanan faham ala Imam Ahmad ibn Hambal ini terus mendapat dukungan dari kalangan muslim berikutnya hingga lahir nama-nama tokoh pendukung yang populer.

Beberapa tokoh yang populer sebagai pelanjut corak keislaman ala Imam Hambali adalah Taqyuddin ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad ibn Abdul Wahab. Sebagai ideolog salaf di era kontemporer mereka kemudian oleh Martin van Bruinessen disebut sebagai bapak kaum fundamentalisme Islam.¹⁴ Gagasan utama kelompok ini sangat menekankan pada prinsip kembali kepada Islam murni, Islam sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, para sahabat dan tabi'in.

¹⁴ Martin van Bruinessen, *Muslim Fundamentalism: Something to be Understood or to be Explained Away*, dalam Howard M. Federspiel (ed), *An Antology of Islamic Studies*, Vol II, (Montreal: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, 1996), 90

Eksistensi ideologi kelompok salafi pada era kontemporer, dapat diidentifikasi terhadap pakaian yang dikenakannya di ruang publik. Penampilan mereka sangat eksklusif dalam berbusana yang dikenakan dalam keseharian. Dikalangan laki-laki misalnya, mereka berbusana dengan model khas tertentu seperti memakai jubah panjang (jalabiyah), mengenakan surban (imamah), memakai celana cingkrang (isbal) dan merawat jenggot panjang (lihyah). Bagi perempuannya, mereka menggunakan pakaian dengan serba hitam yang menutupi seluruh tubuhnya (niqab).¹⁵ Hal ini menandai dirinya sebagai kelompok yang tetap komitmen pengamal ajaran murni Islam sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan generasi muslim awal Islam (Salaf).

Gerakan ini juga bersifat eksklusif dengan cara menarik garis batas antara kelompoknya dengan kelompok lain. Hal ini semakin diperjelas dengan dianutnya ciri khusus lainnya, baik dalam hal penampilan fisik atau cara berpakaian yang membedakan diri mereka dengan kelompok lain. Sebagian kelompok yang mengenakan busana dengan ciri khas tertentu dalam pergaulan keseharian-kelompok ini sangat eksklusif dengan kelompok/komunitas lain, dan pada saat yang sama pula pergaulan diantara mereka sangat terjalin dengan cukup ketat. Artinya, mereka tidak mudah bergaul dengan kelompok atau komunitas lain yang jelas berbeda pandangan keyakinan dengannya.

Pada tahap awal, kelompok salaf/salafi ini dengan semangat dan komitmennya di dalam mengamalkan dan mendakwahkan pemurnian akidah, dan menjaga peribadatan yang benar serta menjaga kualitas moralnya. Sehingga kelompok ini tidak bersinggungan langsung dengan politik atau dengan ideology politik tertentu. Sikap mereka jelas sekali menjauh dari hiruk pikuk dunia politik dan tetap dengan komitmen awal sebagai pengamal pemurnian ajaran Islam. Hal ini terbukti dengan

¹⁵ Noorhaidi Hasan, "Salafi Madrasahs and Islamic Radicalism in Post-New Order Indonesia", dalam Kamruzzaman Bustaman-Ahmad dan Patrick Jory (eds), *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*, (Malaysia, Yayasan Ilmuan, 2022), 95

berbagai dakwah atau ajaran dan gerakan dakwahnya selalu mereka kemas dengan acara halaqah dan daurah.¹⁶

Sebagaimana ideologi dan gerakan dakwah Salafi pada tahap awal yang tidak mengafirmasi dunia politik (praktis), Salafi kontemporer (Wahabisme) yang disebut dengan fundamentalisme Islam, juga tidak bersinggungan dengan politik. Keduanya menjauhkan dakwah keislamannya dari hiruk pikuk dunia politik (hizbiyyah) karena gerakan-gerakan dakwah Islam yang menggunakan politik sebagai medianya diyakininya tidak lagi mengamalkan pemurnian ajaran agama Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab.¹⁷ Dakwah Islam yang bersentuhan dengan politik adalah kesalahan besar (dosa) karena termasuk perbuatan bid'ah dan tidak sesuai amalan Islam murni.

Fenomena salafisme kontemporer ini-yang mendaku sebagai pengamal dan penjaga kemurnian Islam-menurut Hasan, sangat jelas sekali berakar kuat pada doktrin utama Wahabisme, doktrin dan gerakan yang lahir pada abad ke 18 yang digagas oleh ideolog Wahabisme, yakni Muhammad ibn Abdil Wahab. Gerakan ini sebagaimana salafi awal mengusung gagasan pemurnian Islam, yang dengan keras memberantas faham/keyakinan luar yang bersifat tahayyul, khurafat, praktek sufi atau thoriqoah, musyrik dan sejenisnya yang dianggapnya sebagai perbuatan bid'ah dan menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Dengan doktrin ini mereka dengan tegas dan ketat menyebut siapa saja orang atau kelompok dapat disebut beriman dan kafir. Dengan doktrin tegas dan keras ini pula tidak sedikitpun mereka mentolerir perbuatan yang dianggap telah

¹⁶ Noorhaidi Hasan, *Laskar jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LP3S & KITLV, 2008), 31

¹⁷ Abdul Mu'thi, *Memerangi Dakwah Hizbiyyah*, (Salafi 9:16, 1996), 16-19

Al-Husaini, *Hasan bin al-Hasin Irsyad al-bariyyah*, (Sana'a: Dar al-Atsar. . t.t.)

Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia*, (Tesis Dr. Falsafah. Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Universiteit Utrecht, 2005), 343-344

menyimpang dari syariat. Demikian pula mereka sangat menolak adanya taqlid. Oleh karenanya semua harus kembali kepada sumber utama ajaran agama yakni al-Qur'an dan hadits Nabi.

Karena dengan semangat yang sama, salafi kontemporer dapat disebut sebagai wahabisme mengingat kesamaan ajaran mereka dengan para pendahulunya dengan melakukan proses penghimpunan dan penyusunan kembali ajaran, dan mengikuti kembali dengan melakukan berbagai pengaturan dan penyesuaian kembali pemikiran yang telah dikembangkan oleh para tokoh wahabisme sebelumnya seperti Ibn Taimiyyah, Muhammad Ibn Qayyum al-Jauziyah dan Muhammad Ibn Abd al-Wahhab. Tidak aneh kemudian jika di dalam dakwah keislaman ataupun dalam mengeluarkan fatwa-fatwa keislamannya, dua tokoh utama seperti Abd al-Aziz Abd Allah bin Bazz dan Muhamamd Nashir al-Din al-Albani selalu menjadi rujukan utamanya.

Jika Martin van Bruinessen menyebut mereka-para ideolog salaf-sebagai bapak kaum fundamentalisme Islam di era kontemporer, para penstudi Islam, semisal Martin dan lainnya, fundamnetalisme juga disematkan terhadap fenomena dan identitas kegamaan di kalangan umat Islam. Fundamentalisme Islam menunjukkan pada aliran atau faham keislaman yang cenderung menafsirkan kitab suci baik al-Qur'an dan hadits secara kaku (rigid) dan harfiyah (literaris).¹⁸

Beberapa ciri kalangan fundamentalisme yang melekat antara lain mereka sangat menolak adanya perubahan, bersikap intoleransi, tertutup, keras, kaku dalam bermadzhab, tunduk kepada tradisi, berorientasi ke belakang, menentang pertumbuhan dan perkembangan. Dengan ciri-ciri demikian tidak aneh jika mereka akan melakukan pemberangusan terhadap berbagai kritik dan adanya berbagai perbedaan.¹⁹

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, "Fundamentalisme", dalam Muhammad Wahyu Nafis (ed)., *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 86-93

Yusril Ihza Mahendra, "Fundamnetalisme, Faktor dan Masa Depan", *Ibid*, 97

¹⁹ Haidar Ibrahim Ali, *Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme*, di kases tanggal 1 Mei 2023

Dengan ciri yang melekat terhadap fundamentalisme Islam, Akbar S. Ahmed menyebut mereka identik dengan radikalisme dengan menambahkan satu ciri dominan yaitu vulgaritas, cenderung memakai kata-kata kasar serta kotor untuk menyudutkan rival-rival politiknya, bahkan kadangkala tidak mereka sadari bahwa klaim dan memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan kekerasan (violence) dan tindakan amoral.²⁰

Sampai di sini tidak ada perbedaan fundamental kedua ideologi antara Salafisme dan Fundamnealisme. Dalam derajat tertentu keduanya sebatas saling melengkapi dalam menyikapi terhadap adanya arus perkembangan dan kemajuaan zaman yang berbeda pada masanya. Jika Salafisme lahir sebagai respon ketidak setujuannya terhadap Mu'tazilah yang cenderung menggunakan metode rasionalisme, pada saat yang sama Fundamnetalisme melakukan reaksi terhadap faham-faham keislaman yang masih lekat bercampur dengan amaliyah berbau bi'ah dan khurafat di tengah masyarakat yang berlangsung secara massif. Kedua faham ini tetap konsisten dengan dakwah keislamannya, dakwah dengan mengajak masyarakat kembali dengan melaksanakan syari'ah Islam sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam posisi demikian berbeda dengan pendulunya, Islamisme sebagai alternative dari kedua faham sebelumnya mendapat momentum dalam gerakan melanjutkan ideology keagamaan, di mana Islamisme tidak lagi murni hanya bersinggungan dengan soal dimensi purifikasi dan ritual, namun juga mulai menfokuskan gerakannya pada dimensi intelektual dan politik.²¹

Islamisme dengan demikian adalah gerakan Islam yang muncul sebagai gejala sosial politik di berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu. Islamisme berkaitan dengan

²⁰ Akbar S Ahmad, *Post-Modernism and Islam: Predicament and Promise*, (New York: Routledge, 1992), 171.

²¹ Edi Susanto, "Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di Pesantren", (Tadris, 2: 1, 2007), 3.

gerakan yang mengusung ideologi Islam dengan terbentuknya Negara Islam. Para aktivis pengusung ideologi Islam politik disebut dengan kelompok Islamis. Pandangan awal yang diyakini kelompok Islamisme adalah bahwa Islam dan politik tidak dapat terpisahkan, Islam dan politik adalah padu sebagaimana dengan tegas sering dinyatakan bahwa Islam dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*din wa daulah*).

Gagasan ideologi Islamisme yang bergulir ke berbagai dunia muslim dapat dilacak persambungannya kepada para pemikiran salafi. Pemikir salafi awal setelah Ahmad ibn Hambal adalah al-Maududi, Sayyid Qutub dan Ibn Taimiyyah. Mereka disebut sebagai ideolog salafi maupun fundamentalisme, di mana gagasan utama pemikiran mereka menjadi rujukan sekaligus mengilhami gerakan Islamisme berikutnya.

Al-Maududi sebagai seorang pemikir politik Islam jelas menolak demokrasi. Demokrasi sebagai sistem pemeritahan, sepenuhnya kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi, sekaligus sebagai penentu atas pelaksanaan sistem pemerintahan. Sistem demokrasi semacam ini bagi Maududi jelas bertentangan dengan ajaran Islam, sebab bagi Al-Maududi, pada dasarnya sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam masyarakat adalah Allah,²² Ia sang pencipta yang mengatur dan pemilik kehendak mutlak atas keberdaaan alam dan seisinya termasuk keberadaan manusia. Oleh karenanya, dalam sistem ini, manusia tidak lagi tunduk kepada sesama manusia (sebagai pemimpin terhadap yang lain) akan tetapi semua warga Negara muslim berpegang teguh atas perintah Allah dan sunnah Nabi. Sistem ini yang disebut Maududi dengan istilah hakimiyyah ilahiyyah atau *theo-democracy*, pemerintahan demokratik berdasarkan ketuhanan.²³

²² Al-Khaladi, Shalah Abd. Al-Fattah. *Sayyid Qutb al-Syahid al-Hayy*, (Amman: Maktabat al-Aqsha, 1981), 67

²³ Yusril Ihza Mahendra, *Islam dan Konsepsi Kontemporer Mnegenai Negara: Gagasan Jama'at al-Islami di Pakistan dan Masyumi di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, Seri Kajian Kup Agama ke-99 Tahun VII, 1994), 29

Dalam pandangannya bahwa ajaran Islam adalah sempurna. Ia tidak saja mengajarkan ibadah mahdha saja, seperti shalat, puasa, haji, dan zakat, tetapi juga termasuk hukum negara. Artinya, jika hukum Allah ingin ditegakkan dengan sempurna maka menegakkan institusi kenegaraan Ilahi (Islam) adalah keharusan karena dengan sistem ini umat Islam dapat menjadikan syari'ah sebagai undang-undang resmi negara. Sebab menurut al-Maududi, mewujudkan cita-cita Islam sebagai sebuah negara yang tentram, tertib dan damai merupakan harapan yang dicita-citakan oleh Islam sendiri sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.²⁴

Begitu pula pemikiran kelompok Islamisme jika dirujuk kepada ideolog pertamanya tersambung pada pemikiran Ibn Taimiyyah. Sebagaimana pemikiran al-Maududi, Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa Islam merupakan tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi yaitu hukum Allah.²⁵ Karena hukum tertinggi adalah hukum Tuhan, maka satu-satunya pemilik otoritas tertinggi adalah Tuhan. Atas tegaknya hukum Tuhan di bumi, manusia sebagai pemimpin dalam pemerintahan Islam satusnya sebatas sebagai wakil (khalifah) Allah di muka bumi. Dalam pandangan ini warga masyarakat wajib mena'ati pemerintahan yang melaksanakan syariat Allah, dan sebaliknya, manusia tidak wajib mena'ati pemerintahan yang tidak menjalankan syara'at Islam dalam pemerintahannya.

Dalam konsep ideology negara theo-democracy ini terdapat diskursus dua klasifikasi status warga negara yaitu siapa yang disebut warga negara muslim dan bukan warga muslim (ahl al-Dhimmy). Hal ini berimplikasi terhadap posisi siapa yang berhak memimpin sebagai kepala pemerintahan, muslim atau bukan.

Fenomena pergeseran ideologi Salafi dan Fundamnetalisme menjadi gerakan Islam politik, Islamisme menjadi gerakan riil di tangan Maududi

²⁴ Abu al-A'la al-Mawdudi, *Tafhim al-Qur'an* (The Meaning of The Qur'an), pent. Ch. Muhammad Akbar, Vol. Viii, (Lahore: Islamic Publications, 1989), 57

²⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj, Masrohimi, (Jakarta: Risalah Gusti 1999), 82

dengan membentuk Jama'ah al-Islami di India sekaligus sebagai ideologinya, dan terbentuknya Ikhwan al-Muslimin (IM) di Mesir pada tahun 1928 M,²⁶ yang didirikan oleh Hasan al-Banna (1906-1949 M) dan sekaligus perumus ideologinya.

Al-Banna sebagai pendiri Ikhwan al-Muslimin menegaskan bahwa menegakkan Negara Islam dengan melaksanakan syara'at Islam yang sumbernya adalah al-Qur'an dan Hadits Nabi menjadi keharusan bagi umat Islam. Hal ini menjadi pilihan agar umat Islam tidak terus menerus mengalami keterpurukan karena cengkraman ideologi sekuler Barat yang telah merusak intelektual dan spiritual umat Islam. Negara Islam sebagai alternatif pilihan diharapkan dapat menyudahi kondisi tidak menguntungkan bagi umat Islam, di samping ideologi Barat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Dengan kata lain, negara Islam dengan konstitusi syari'atnya tidak saja menjadi alternative semata tapi sekaligus sebagai solusi. Dengan prinsip semacam ini, jargon populer selalu digemakan kalangan Islamisme bahwa "Islam adalah solusi."²⁷

Gerakan Ikhwan al-Muslimin semakin radikal setelah bergabungnya Sayyid Qutb (1906-1966), yang mengadopsi konsep hakimiyah (kadaulatan Tuhan) al-Maududi serta mereradikalisasi konsep Jahiliyah modern al-Maududi, sebagai pendahulunya. Dalam konsep hakimiyah, Negara Islam adalah Negara yang mengikuti ketentuan Tuhan sebagai pemilik kuasa mutlak. Dalam Negara Islam Negara mengikuti hukum Allah, dan bukan sebaliknya, di mana negara membuat atau menentukan hukumnya sendiri. Konsep hakimiyah ini kemudian berhubungan dengan Jahiliyah modern, di mana jahiliyah modern bagi Qutb adalah suatu situasi di mana nilai-nilai fundamental yang diturunkan Tuhan kepada manusia diganti dengan nilai-nilai palsu (artifisial), nilai yang berdasar hawa nafsu

²⁶ Al-Ikhwan al-Muslimin adalah organisasi keagamaan memiliki visi negara Islam dengan berbasis syariah sebagai tatanan politik yang menjadi ciri cukup mendasar Islamisme. Lihat Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, 20

²⁷ Gilles Kepel. *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi di Dunia Modern*, ter, Masdar Hilmy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 10

duniawi. Jahiliyah modern adalah modernitas “barbaritas baru,” situasi yang ketentuannya tidak lagi disandarkan kepada hukum Tuhan (Allah).

Sebagai gerakan Islam politik di era kontemporer, Ikhwan al-Muslimin menjadikan Islam sebagai rujukannya (al-dawlah almadaniyyah bi al-marja’iyyah al-Islamiyyah) mendapat sambutan luas dikalangan muslim di beberapa dunia, tanpa terkecuali sebagian muslim Indonesia turut serta menyambutnya. Ini terbukti dengan terbentuknya beberapa ormas keagamaan berbasis ideologi Islam, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan yang lainnya.

Ormas-Ormas Islam seperti FPI, HTI dengan segera terbentuk hanya beberapa bulan pasca tumbangannya rezim Orde Baru. Sejak berdirinya, HTI mislanya dengan agenda menerapkan syariat Islam dengan terang-terangan meneriakkan Indonesia harus menjadi negara dengan sistem khilafah (khilaf al-Islamiyah) dengan berideologi Islam.²⁸

Begitu juga Front Pembela Islam (FPI), melalui gerakan dan dakwahnya, menyuarakan diterapkannya syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj Nubuwwah. Sebagai aksi nyata dalam gerakan dakwahnya, FPI dengan dalih amal ma’ruf nahi mungkar diberbagai moment aksinya tidak ragu-ragu men-sweeping tempat-tempat terjadinya praktek kemaksiatan seperti hiburan malam, perjudian dan sejenisnya.²⁹ Tindakan ini dilakukan dengan cara-cara paksa dan bahkan tidak sedikit tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Penutup

²⁸ Irfan S. Awwas, (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari’ah Islam*, (Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001)

²⁹ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002), 3

Ideologi Salafi dan Fundamentalisme pada awal gerakannya sangat bersifat apolitis. Keduanya dalam melaksanakan dakwah Islam tidak bersinggungan dengan dunia politik (kekuasaan) praktis. Ideologi dan gerakan keduanya sebatas menjaga kemurnian akidah Islam dari bercampurnya dengan khurafat, bid'ah dan segala yang bertentangan dengan Islam. Pijakan ideologi dan gerakannya yang sangat keras dalam mendakwahkan Islam dengan mengikuti corak pemahaman agama sebagaimana yang diajarkan Nabi, para shahabat dan Imam Mazdhab. Keduanya tidak menafsirkan teks-teks agama

Eksistensi ideologi Salafi dan Fundamentalisme menjadi embrio kemunculan ideologi dan gerakan Islamisme dengan melakukan berbagai adaptasi dan sistematisasi ajaran keduanya. Islamisme yang mengusung ide simbolisme agama di mana Islam dan Negara disatu padukan. Mengusung ide penyatuan Islam dan Negara sebagai solusi yang mampu menyelesaikan problem ekonomi, politik yang selama itu tidak menguntungkan bagi Islam bahkan menimbulkan kemunduran dan keterpurukan spiritualitas dan pemikiran Islam sendiri. Sebagai solusi, bagi Islamisme dengan menerapkan syariat Islam dan menegakkan Negara Islam (Khilafah Islamiyah) menjadi pilihan niscaya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mu`thi, *Memerangi Dakwah Hizbiyyah*. Salafi 9:16, 1996.

Al-Husaini, Hasan bin al-Hasin Irsyad al-bariyyah, Sana'a: Dar al-Atsar. . t.t.

Ali. Haidar Ibrahim, *Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme*, di kases tanggal 11 April 2023.

Al-Mawdudi. Abu al-A'la, *Tafhim al-Qur'an (The Meaning of The Qur'an)*, pent. Akbar. Ch. Muhammad, Vol. Viii, Lahore: Islamic Publications, 1989.

- Amin Al-Alim. Mahmud, "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 1 Tahun 2002.
- Awwas. Irfan S., (ed.), *Risalah Kongres Mujahidin dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001.
- Bayat. Asef, "The Coming of a Post-Islamist Society", *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, Vol. 5, No. 9, 1996.
- Bayat. Asef, *Pos-Islamisme*, Terjemahan oleh. Faiz Tajul Milah, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Berman. Sheri, "Islamisme, revolution, and Civil Society", *Perspectives on Politics*, 1, 2: 2003.
- Gellner. Ernest, *Postmodernisme, Reason and Religion*, London: Routledge, 1992.
- Haidar Ibrahim Ali, *Menelusuri Sejarah dan Makna Fundamentalisme*, di kases tanggal 1 Mei 2023.
- Hasan. Noorhaidi, "Salafi Madrasahs and Islamic Radicalism in Post-New Order Indonesia", dalam Kamruzzaman Bustaman-Ahmad dan Patrick Jory (eds), *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*, Malaysia, Yayasan Ilmuan, 2022.
- Hasan. Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia*, Tesis Dr. Falsafah. Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Universiteit Utrecht, 2005.
- Hasan. Noorhaidi, *Laskar jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: LP3S & KITLV, 2008.
- Hasyim. Syafiq, "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, (Edisi No. 1 Tahun 2002)

Jamhari, "Mapping Radical Islam in Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, 3 (2003).

Jindan. Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj, Masrohim (Jakarta : Risalah Gusti 1999).

Kepel. Gilles. *Pembalasan Tuhan: Kebangkitan Agama-Agama Samawi di Dunia Modern*, ter, Masdar Hilmy (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

Mahendra. Yusril Ihza, *Islam dan Konsepsi Kontemporer Mengenai Negara: Gagasan Jama'at al-Islami di Pakistan dan Masyumi di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, Seri Kajian Kup Agama ke-99 Tahun VII, 1994).

Munawwir. Ahmad Warison, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997).

Patmono, "Aspirasi Islam Dalam Konteks Negara Bangsa" dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed.). *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. (Bandung: Mizan, 2006).